

Walhi: Usut Tuntas Sumur Minyak Aceh

REPUBLIKA, 7 Mei '18.

BANDA ACEH — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta kepolisian menuntaskan kasus pertambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, secara objektif dan transparan.

"Aparat penegak hukum harus mampu menangkap, dan menindak aktor terlibat dalam tambang minyak ilegal," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur di Banda Aceh, dalam keterangan persnya, Ahad (7/5).

Dia mengatakan, hendaknya kepolisian tidak cuma menangkap aktor di level bawah seperti akhir pekan lalu, tetapi juga harus mampu menangkap aktor besar yang berperan sebagai pemilik modal.

Bahkan, kata dia, jika ditemukan oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam aktivitas pertambangan minyak mentah tersebut, harus ditindak tegas. "Sebab tambang minyak ilegal bisa berjalan di lapangan, tak terlepas dukungan berbagai oknum," kata Nur.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus melakukan pembersihan di sekitar lokasi kebakaran sumur minyak.

"Sumur minyak yang masih mengeluarkan semburan minyak beraroma gas itu akan ditutup tim teknis PT Pertamina EP," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur Syahrizal di Idi, Jumat (5/5).

Untuk pembersihan lokasi terse-

but, kata dia, BPBD Aceh Timur mengerahkan mobil pemadam kebakaran dan melakukan pembersihan di sekitar lokasi dari bekas-bekas minyak.

Dia mengatakan, pembersihan yang turut dibantu aparat TNI/Polri bertujuan untuk segera dilakukan penutupan. PT Pertamina secara teknis melakukan penutupan semburan minyak dalam pekan lalu. Namun, hingga saat ini, masih semburan minyak itu tercium aroma gasnya radius 300-400 meter dari titik semburan, sehingga hampir 500 jiwa diungsikan.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Idrus Marham yang dijadwalkan akan mengunjungi sumur minyak yang meledak dan terbakar hingga menelan puluhan korban jiwa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Jumat (4/5), ternyata batal.

"Pak Menteri Sosial RI tidak jadi ke Aceh Timur, karena ada agenda lain. Mewakili beliau adalah Dirjen Linjamsos," kata Kepala Subbagian Protokol Kementerian Sosial Agung Hendrawan, Kamis (3/5) malam.

Kendati demikian, Kementerian Sosial tetap memberikan layanan dukungan psikososial (LDP) kepada korban terdampak kebakaran sumur minyak. "Upaya ini dengan mendatangi langsung korban yang saat ini mengungsi di rumah sanak-saudaranya," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Harry yang berada di Aceh Timur

mewakili Menteri Sosial Idrus Marham menyerahkan bantuan dan santunan untuk para korban.

Dia mengatakan, LDP diprioritaskan kepada kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan pengungsi yang anggota keluarganya meninggal.

Kemensos juga mengerahkan Potensi Penanggulangan Bidang Perlindungan Sosial yang terdiri dari 28 anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana), 95 pendamping program keluarga harapan (PKH), 24 orang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan tiga orang pendamping disabilitas berat.

Untuk mendukung hal tersebut, kata dia, pihaknya mengupayakan tindak lanjut program bantuan sosial seperti PKH, bantuan beras sejahtera (rastra), bantuan pangan nontunai, program Indonesia sehat, program Indonesia sejahtera, kelompok usaha bersama (kubbe), maupun usaha ekonomi produktif (UEP). Data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Aceh menyebutkan, pada Rabu (25/4) pukul 02.05 WIB, sebanyak 22 orang dinyatakan meninggal dunia.

Sebanyak 34 korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dua korban berstatus rawat jalan, lima ludes terbakar, dan 198 orang mengungsi ke kerabat terdekat. Polres setempat telah menetapkan seorang tersangka lagi, setelah sebelumnya lima orang dalam kasus ini.